

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Rencana Strategis merupakan dokumen yang berisi arah dan rencana pembangunan serta target yang akan dicapai dalam kurun waktu tertentu dalam pelaksanaan kegiatan suatu SOPD. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Renstra ini berfungsi sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan suatu SOPD agar lebih terarah, efektif dan efisien serta selaras dengan visi dan misi pemerintah yang dirumuskan dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Berdasarkan hal di atas maka Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang, sebagai bagian kewenangan daerah dibidang kesehatan yang diamanahkan oleh Kepala Daerah perlu menyusun Renstra Dinas Kesehatan Kota untuk tahun 2013 – 2018 dalam rangka pencapaian visi dan misi pembangunan kesehatan.

1.2. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Pasal 18 ayat (6);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
8. Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah.

14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
19. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
20. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Padang Panjang Tahun 2013-2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 5 Tahun 2016;
22. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Organisasi Dinas Kesehatan;

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1. Maksud

1. Tersedianya dokumen sebagai acuan perencanaan dan kegiatan Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang.
2. Tersedianya data pencapaian program dan kegiatan Dinas Kesehatan pada 5 (lima) tahun sebelumnya
3. Sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja, dan RKA Dinas Kesehatan
4. Sebagai tolok ukur dalam pencapaian Visi Dinas Kesehatan
5. Salah satu instrument untuk pertanggungjawaban kinerja Dinas Kesehatan.

1.3.2. Tujuan

Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan Sumber Daya Kesehatan dalam pencapaian Visi Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang dan selaras dengan Visi dan Misi Kota Padang Panjang.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Renstra Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1.Latar Belakang
- 1.2.Landasan Hukum
- 1.3.Maksud dan Tujuan
- 1.4.Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN DINAS KESEHATAN

- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
- 2.2. Sumber Daya Dinas Kesehatan
- 2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

BAB III. ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

- 3.1. Identifikasi Masalah berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan
- 3.2.Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
- 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Dinas Kesehatan Provinsi
- 3.4.Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV. VISI,MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

- 4.1. Visi dan Misi
- 4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
- 4.3. Strategi dan Kebijakan

BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

BAB VI. INDIKATOR KINERJA DINAS KESEHATAN YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

BAB VII. PENUTUP

BAB II

GAMBARAN UMUM PELAYANAN DINAS KESEHATAN KOTA PADANG PANJANG

2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang dalam Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kota Padang Panjang adalah Dinas yang bertugas membantu Walikota dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, promosi dan sumber daya kesehatan dengan fungsi:

1. Perumusan dibidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan PKRT, promosi dan sumber daya kesehatan
2. Pelaksanaan kebijakan teknis dibidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan PKRT, promosi dan sumber daya kesehatan
3. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya
4. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan, dan PKRT, promosi dan sumber daya kesehatan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya

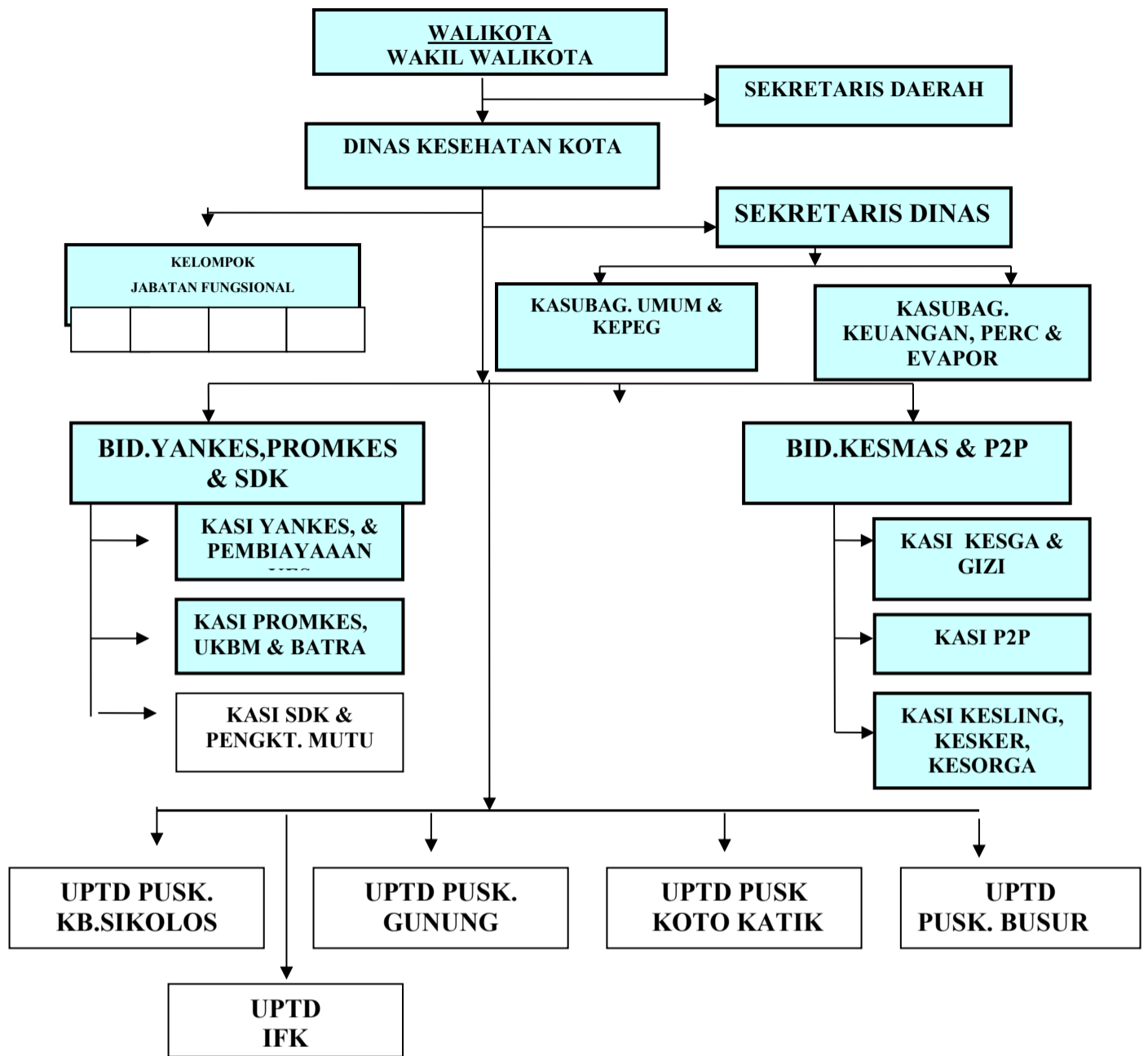
Berdasarkan Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang maka susunan organisasi Dinas Kesehatan terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris Dinas
3. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat, Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
4. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan, Promosi dan Sumber Daya Kesehatan

STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan, maka susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang adalah sebagai berikut:

Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja DKK Padang Panjang



2.2. SUMBER DAYA

Jumlah Tenaga Kesehatan di Lingkungan Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang sampai pada bulan Februari 2017 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.1
Jumlah Tenaga Kesehatan Bulan Februari 2017

No	Jenis Tenaga	Jumlah
1	S 2 Kesehatan Masyarakat	6
2	S 2 Ekonomi Kesehatan	1
3	Dokter Umum	9
4	Dokter Gigi	3
5	Perawat Ners	4
6	Perawat S1	1
7	S1 Kesehatan Masyarakat	20
8	Apoteker	4
9	Bidan Pendidik (D IV)	5
10	S1 Teknik Elektromedik	1
11	DIII Keperawatan	23
12	DIII Kesehatan Lingkungan	5
13	DIII Bidan	23
14	DIII Rekam Medik	8
15	DIII Gizi	4
16	DIII Analisis Kesehatan	7
17	DIII Gigi	4
18	DIII Farmasi	4
19	DIII Akuntansi	1
20	DIII Elektromedik	1
21	DIII Kimia Analisis	2
22	DI Bidan	5
23	Perawat (SPK)	14
24	SMAK	1
25	SPRG	4
26	SMF	5
27	SLTA	8
Jumlah		173

Sumber : Data Kepegawaian DKK Tahun 2017

Tabel 2.2:
Komposisi Pegawai berdasarkan Eselonering Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang

No	JABATAN	ESELON	JUMLAH	PENDIDIKAN
1	Kepala Dinas	II b	1	Strata 2
2	Sekretaris Dinas	III a	1	Strata 2
3	Kepala bidang	III b	2	Strata I
6	Kasi /Kasubag	IV a	8	Strata 2, Strata I
7	Kepala UPTD	IV a	5	Strata 1
8	Ka. TU UPTD	IV b	4	Strata 2, Strata 1, SLTA

Sumber : Data Kepegawaian DKK Tahun 2017

Tabel 2.3:

Komposisi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan penjenjangan

No	Diklat	Jumlah
1	Diklatpim Tk. II	-
2	Diklatpim Tk. III	3
3	Diklatpim Tk. IV	4
	Jumlah	7

Sumber : Data Kepegawaian DKK Tahun 2017

SARANA DAN PRASARANA

Sarana dan prasarana kesehatan yang terdapat di wilayah kerja Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang sampai Februari 2017 dapat di lihat pada tabel berikut :

Tabel 2.4
Data Sarana dan Prasarana Kesehatan

No	Sarana dan Prasarana Kesehatan	Jumlah
1	Rumah Sakit	2
2	Puskesmas	4
3	Puskesmas Pembantu	6
4	Klinik Pengobatan	2
5	Puskesmas Keliling	4
6	Praktek Dokter	41
7	Praktek Bidan	14
8	Pos Kesehatan Kelurahan	13
9	Posyandu Balita	92
10	Posyandu Lansia	36
11	Poskestren	7
12	Apotik	16
13	Rumah obat berizin	4
14	Batra dengan izin praktek	2
	Total	243

Sumber : Bid.Yankes, Promkes dan SDK 2017

2.3 KINERJA PELAYANAN

2.3.1. GAMBARAN 10 PENYAKIT TERBANYAK

Gambaran 10 penyakit terbanyak di Kota Padang Panjang tahun 2016 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.5
10 Penyakit Terbanyak Tahun 2016

N0	NAMA PENYAKIT	JUMLAH
1	Nasofaringitis (Common Cold)	7.908
2	Hipertensi	4.627
3	ISPA	3.716
4	Tukak lambung/Gastritis	2.877
5	Penyakit pulpa dan jaringan perapikal	2.167
6	DM	2.076
7	Rematisme	1.728
8	Gangguan Refraksi dan akomodasi	1.548
9	Penyakit Kulit Alergi	1.059
10	Hyperkolesterol	820
		28.526

Sumber : Bidang Yankes, Promkes dan SDK 2017

2.3.2. INDIKATOR KESEHATAN TAHUN 2014 - 2018

Tabel 2.6
Target Indikator Kesehatan Sampai Tahun 2018

NO	KEGIATAN	TARGET INDIKATOR RENSTRA PER TAHUN				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	Meningkatnya persentase penduduk yang menggunakan jamban sehat	69,25 %	70,64%	72,05%	73,49	75,00%
2	Meningkatnya persentase penduduk yang memiliki akses air bersih	92,00 %	93,00%	93,00%	94,00%	95,00%
3	Meningkatnya persentase penduduk yang tidak merokok di rumah	58,81 %	60,57%	62,39%	64,25%	65,00%
4	Meningkatnya tingkat kesembuhan penyakit menular TB paru	68,00 %	72,00%	76,00%		
	Meningkatnya angka keberhasilan pengobatan pasien TB paru Semua Kasus				80,00%	80,00%
5	Meningkatnya persentase penjarangan kasus baru penyakit	21,00%	25,00%	29,00%	34,00%	38,00%

	tidak menular (PTM)					
6	Penyempurnaan capaian 8 tatanan kota sehat	6 tatanan	6 tatanan	8 tatanan	8 tatanan	8 tatanan
7	Menurunnya persentase status gizi kurang	5,8%	5,80%	5,00%	5,00%	5,00%
8	Meningkatnya persentase tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi sesuai penempatan	64,00%	65,00%	70,00%	75,00%	80,00%
9	Meningkatnya Operasional Sistem Informasi Kesehatan Daerah (SIKDA)	15,00%	20,00%	25,00%	30,00%	40,00%
10	Terwujudnya Puskesmas yang terakreditasi	0	0	2 pkm	2 pkm	0
11	Pembangunan Gedung Puskesmas yang representatif	0	0	50%		100%
12	Meningkatnya Nilai SAKIP DKK	-	-	CC	B	B

Sumber : Laporan DKK , tahun 2017

2.3.3. HASIL YANG DICAPAI

Keberhasilan pencapaian program tahun 2013 – 2016 sebagai berikut :

Tabel 2.6
Hasil Capaian Renstra Tahun 2014 – 2018

N O	KEGIATAN	HASIL CAPAIAN RENSTRA PER TAHUN				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	Meningkatnya persentase penduduk yang menggunakan jamban sehat	77,90%	70,10%	71,02%		
2	Meningkatnya persentase penduduk yang memiliki akses air bersih	97,20%	83,40%	92,03%		
3	Meningkatnya persentase penduduk yang tidak merokok di rumah	43,00%	54,80%	60,00%		
4	Meningkatnya tingkat kesembuhan penyakit menular TB paru	68,00%	65,51%	68,00%		
	Meningkatnya angka keberhasilan pengobatan pasien TB paru semua kasus	-	-	-		
5	Meningkatnya persentase penjarangan kasus baru penyakit tidak menular (PTM)	22,00%	20,46%	22,00%		
6	Penyempurnaan capaian 8	8 tatanan	8 tatanan	8 tatanan		

	tatanan kota sehat					
7	Menurunnya persentase status gizi kurang	5,10%	5,60%	5,82%		
8	Meningkatnya persentase tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi sesuai penempatan	65,00%	65,90%	80,00%		
9	Meningkatnya Operasional Sistem Informasi Kesehatan Daerah (SIKDA)	20,00%	20,50%	25,00%		
10	Terwujudnya Puskesmas yang terakreditasi	0	0	2 pkm		
11	Pembangunan Gedung Puskesmas yang representatif	0	0	1 pkm		
12	Meningkatnya Nilai SAKIP DKK			CC	B	B

Sumber : Laporan DKK,tahun 2017

2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN

2.4.1. Tantangan

1. Tingginya harapan dan tuntutan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang paripurna.

Hal ini merupakan tantangan terbesar bagi industri pelayanan kesehatan di seluruh dunia. Mengingat tingkat pendidikan dan wawasan yang sudah semakin tinggi, status ekonomi yang makin meningkat, diseminasi informasi dengan akses internet yang makin mudah dan dapat dijangkau siapa saja, baik melalui jejaring sosial maupun media lainnya.

2. Masyarakat Ekonomi Asean (MEA)/pasar bebas serta inflasi dapat berdampak pada program-program kesehatan.

Kebebasan ekonomi lintas negara dan lintas benua juga memberikan dampak terhadap tenaga kesehatan dan jenis pelayanan. Petugas kesehatan dari negara luar dengan kemampuan dan keterampilan handal mulai masuk ke Indonesia sebagai pesaing dalam memberikan pelayanan kesehatan. Disamping itu perkembangan ekonomi juga mempengaruhi dari biaya pelayanan yang harus di siapkan dan diantisipasi segera.

3. Legislasi dan Peraturan Perundang-undangan.

Banyaknya legislasi dan peraturan perundang-undangan yang dapat menjadi bumerang bagi tenaga kesehatan jika bekerja tidak sesuai standar pelayanan. Masyarakat melek hukum dengan lembaga hukum yang siap sedia memberikan jasa dalam mengangkat kasus ketidak puasan terhadap pelayanan kesehatan. Disamping itu dengan adanya Undang-Undang seperti UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 8 tahun 2009 tentang Perlindungan Konsumen, Kepmenkes Nomor 1239 tahun 2010 dan Kepmenkes Nomor 148 tahun 2012 tentang Registrasi dan Praktek Keperawatan serta peraturan

perundang-undangan tenaga fungsional lainnya, menuntut tenaga kesehatan untuk selalu waspada dan hati-hati dalam memberikan pelayanan kesehatan.

4. Perkembangan Teknologi Kesehatan

Teknologi industri yang semakin maju dan berkembang sangat mempengaruhi teknologi kesehatan. Peralatan medis semakin canggih dan berkembang membuat tenaga kesehatan harus selalu meningkatkan kemampuan dan keterampilan dalam penguasaan teknologi moderen di bidang kesehatan.

5. Pengaruh Global Warming terhadap anomali dan kecendrungan penyakit.

Peningkatan suhu bumi akibat efek rumah kaca mengakibatkan meningkatnya berbagai jenis penyakit tertentu terutama penyakit zoonosis. Fenomena meningkatnya penyakit dengan berbagai anomali ini, membutuhkan keahlian khusus dari tenaga kesehatan untuk dapat mencegah dan mengatasinya. Untuk itu dibutuhkan penambahan ilmu dan wawasan yang terus menerus dan berkelanjutan.

6. Media Promosi Kesehatan yang masih belum mencapai target dan sasaran.

Kecenderungan pencapaian target Kesehatan Nasional lebih diarahkan kepada Preventif dibanding kuratif. Untuk itu salah satunya, dibutuhkan media preventif bagi masyarakat berupa brosur/lifleaf/poster/baliho/siaran radio dan Televisi yang edukatif, dan lain-lain melalui penyediaan media promosi kesehatan yang inovatif dan kreatif.

7. Padang Panjang terletak didaerah persimpangan yang menghubungkan berbagai daerah.

Letak geografis Kota Padang Panjang yang dipersimpangan merupakan tantangan dalam peningkatan kualitas pelayanan kesehatan. Karena akses yang dekat ke beberapa daerah yang bisa menjadi pesaing menjadikan segala sarana prasarana dan SDM yang ada untuk selalu meningkatkan diri untuk mampu bersaing dimata masyarakat dan di pilih sebagai tempat pelayanan kesehatan.

2.4.1. Peluang

1. Tingginya permintaan peningkatan ilmu dan keterampilan dari tenaga kesehatan.

Hal ini juga dimungkinkan dengan banyaknya lembaga/institusi pendidikan baik swasta maupun negeri yang dapat diakses dengan mudah.

2. Undang-Undang Nomor 33 dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 yang cukup mendukung dalam sistem penganggaran dalam bidang kesehatan.

Hal ini memungkinkan kemudahan dalam perencanaan penganggaran keuangan pelayanan kesehatan dan pencairan dana.

3. Tingginya Komitmen Pemerintah Daerah sesuai dengan Visi Misi Daerah

Komitmen Pemerintah Daerah terhadap pengembangan sistem pelayanan kesehatan di daerah sangat menentukan keberhasilan dari pelayanan kesehatan itu sendiri. Mengingat segala perencanaan dan penganggaran biaya harus disetujui oleh kepala daerah. Selain itu visi misi pemerintahan daerah ini merupakan lanjutan dari visi

misi kepala pemerintah sebelumnya yang juga memberikan perhatian penuh terhadap kemajuan pelayanan kesehatan.

4. Dukungan LSM dan Organisasi Profesi.

Dukungan berupa pengawasan dari LSM dan Organisasi profesi sangat dibutuhkan agar pelayanan kesehatan yang diberikan dapat berjalan sesuai dengan aturan dan standar yang berlaku di masing-masing profesi/ jabatan fungsional.

5. Adanya dana pendukung dari APBN/DAK

Dukungan dana dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan melalui APBN dan DAK dapat meningkatkan kemajuan pelayanan disamping sumber dana dari APBD yang ada di daerah. Selain itu untuk mewujudkan penyediaan dana 5 % dari total anggaran pembangunan untuk kesehatan sesuai dengan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009.

BAB III ISU-ISU STRATEGIS

3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN

Beberapa isu strategis

1. Capaian perilaku Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di Rumah Tangga masih kurang
2. Masih banyak penduduk yang belum menggunakan jamban sehat dan akses air bersih
3. Pengontrolan kualitas air minum masyarakat belum maksimal
4. Tingkat keberhasilan pengobatan penyakit TB Paru masih dibawah standar
5. Deteksi dini penyakit tidak menular (Jumlah Posbindu PTM) masih kurang
6. Masih kurangnya kualitas dan kuantitas SDM Kesehatan sesuai kompetensi.
7. Sarana dan prasarana Puskesmas dalam mencapai pelayanan Puskesmas yang terakreditasi belum memadai
8. Prevalensi Balita gizi kurang/buruk masih diatas 3,5 %
9. Masih kurangnya Media Promosi Kesehatan bagi masyarakat

3.2. TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH

***VJSJ* :**

Kota Padang Panjang Amanah, Aman, dan Sejahtera

***MJSJ* :**

Meningkatkan Kualitas Kesehatan Masyarakat

Tujuan

1. Peningkatan Pelayanan Berbasis Masyarakat
2. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dasar
3. Peningkatan status RSUD dari type C menjadi type B

Sasaran :

1. Meningkatnya Prilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)
2. Meningkatnya status gizi masyarakat
3. Meningkatnya kualitas dan kuantitas SDM pelayanan dasar
4. Meningkatnya sarana dan prasarana pelayanan kesehatan
5. Meningkatnya kuantitas dan kualitas SDM RSUD
6. Meningkatnya sarana dan prasarana RSUD
7. Meningkatnya mutu pelayanan

Strategi :

1. Meningkatkan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat
2. Meningkatkan penegakan Perda Kawasan Tanpa Rokok
3. Meningkatkan penegakan Perda Tata Bangunan
4. Meningkatkan peran posyandu balita, lansia dan posbindu PTM dan kelurahan siaga
5. Mengoptimalkan forum kota sehat
6. Meningkatkan pola pikir dan perilaku sadar gizi masyarakat
7. Mengoptimalkan tenaga kesehatan
8. Peningkatan sarana dan prasarana sesuai standar
9. Menambah tenaga kesehatan di RSUD sesuai standar type B
10. Meningkatkan kemampuan tenaga kesehatan sesuai kompetensi
11. Memenuhi sarana dan prasarana RSUD sesuai standar type B
12. Penyusunan SOP jelas bagi seluruh jenis pelayanan di RSUD

Kebijakan:

1. Mengintensifkan sosialisasi kepada masyarakat
2. Meningkatkan kualitas penyuluhan melalui peningkatan kualitas tenaga penyuluh
3. Menegakan Perda Kawasan Tanpa Rokok
4. Menegakan Perda Tata Bangunan
5. Menciptakan Keluarga Sadar Gizi Masyarakat
6. Mengadakan tenaga kesehatan
7. On Job Training
8. Relokasi dan tambahan tenaga kesehatan
9. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pelayanan kesehatan
10. Memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan di RSUD sesuai standar RS type B
11. Mengadakan sarana dan prasarana RSUD sesuai standar type B
12. Sosialisasi SOP pelayanan RSUD pada seluruh masyarakat
13. Penerapan dan pengawasan pelaksanaan SOP oleh seluruh personil di RSUD

3.3. TELAAHAN RENSTRA DINAS KESEHATAN KOTA PADANG PANJANG DAN RENSTRA DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA BARAT

Berdasarkan RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2016 – 2021 beberapa strategi pembangunan kesehatan yang dilaksanakan melalui :

1. Meningkatkan keterpaduan dalam pelayanan kesehatan masyarakat yang lebih merata
2. Meningkatkan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan
3. Meningkatkan akses layanan kesehatan dasar dan rujukan yang berkualitas
4. Meningkatkan jumlah dan kualitas sumber daya kesehatan serta kefarmasian dan alat kesehatan
5. Meningkatkan Komitmen Pemerintah Daerah dalam peningkatan pembiayaan promotif dan preventif untuk layanan kesehatan
6. Meningkatkan jaminan kesehatan masyarakat kurang mampu

Arah kebijakan yang dilaksanakan melalui :

1. Peningkatan layanan kesehatan dengan lebih menitik beratkan pada upaya promotif dan preventif dibandingkan dengan upaya kuratif
2. Pemberdayaan masyarakat dan peningkatan upaya promosi kesehatan
3. Penguatan gerakan masyarakat, lembaga pemerintah dengan swasta dalam peningkatan upaya kesehatan masyarakat
4. Peningkatan pelayanan dasar dan rujukan yang berkualitas
5. Peningkatan akreditasi rumah sakit daerah
6. Peningkatan perbaikan gizi masyarakat
7. Peningkatan kesehatan ibu dan anak
8. Peningkatan cakupan akses, keterjangkauandan mutu pelayanan kesehatan
9. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan dan gizi dengan fokus utama pada 1000 hari kehidupan manusia
10. Peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit menular terutama HIV dan Tuberkulosis
11. Peningkatan pemerataan dan kualitas kesehatan lingkungan
12. Peningkatan ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan, dan kualitas farmasi dan alat kesehatan
13. Peningkatan jumlah dan kualitas sumber daya kesehatan yang memiliki kompetensi dan terstandarisasi
14. Peningkatan kualitas pelayanan dan rehabilitasi gangguan kesehatan kejiwaan
15. Peningkatan efektifitas pembiayaan kesehatan
16. Peningkatan ketidaktepatan sasaran pemberian jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin.

Dengan Isu Strategis :

1. Masih tingginya kematian bayi
2. Masih tingginya kematian ibu
3. Masih tingginya prevalensi balita gizi kurang dan stunting
4. Masih tingginya penyakit menular dan tidak menular
5. Masih tingginya permasalahan kesehatan akibat bencana
6. Masih rendahnya akses sanitasi dasar
7. Belum optimalnya pemenuhan sumberdaya kesehatan
8. Masih rendahnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
9. Makin tingginya kasus gangguan jiwa
10. Kurang tersedianya data dan informasi yang memadai sesuai kebutuhan dan tepat waktu
11. Belum optimalnya dukungan manajemen
12. Masih belum optimalnya mutu Unit Pelayanan Teknis Dinas (UPTD)

TELAAHAN RENSTRA DINAS KESEHATAN KOTA PADANG PANJANG DAN RENSTRA KEMENTERIAN KESEHATAN RI

Dalam RPJMN 2015 – 2019, sasaran yang ingin dicapai adalah meningkatkan derajat kesehatan dan status gizi masyarakat melalui upaya kesehatan dan pemberdayaan masyarakat yang didukung dengan perlindungan finansial dan pemerataan pelayanan kesehatan

Sasaran Pembangunan Kesehatan pada RPJMN 2015 – 2019 sebagai berikut :

NO	INDIKATOR	STATUS AWAL	TARGET 2019
1	Meningkatnya Status Kesehatan Gizi Masyarakat		
	a. Angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup	346 (SP 2010)	360
	b. Angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup	32 (2012/2013)	24
	c. Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita (persen)	19,6 (2013)	17,0
	d. Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak baduta (bawah dua tahun) (persen)	32,9 (2013)	28,0
2	Meningkatnya Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular		
	a. Prevalensi Tuberkulosis (TB) per 100.000 penduduk	297 (2013)	245
	b. Prevalensi HIV (persen)	0,46 (2014)	< 0,50
	c. Jumlah Kab/Kota mencapai eliminasi malaria	212 (2013)	300
	d. Prevalensi tekanan darah tinggi (persen)	25,8 (2013)	23,4
	e. Prevalensi obesitas pada penduduk usia 18+ tahun	15,4 (2013)	15,4

	(persen)		
	f. Prevalensi merokok penduduk usia \leq 18 tahun	7,2 (2013)	5,4
3	Meningkatnya Pemerataan dan Mutu Pelayanan Kesehatan		
	a. Jumlah kecamatan yang memiliki minimal satu puskesmas tersertifikasi akreditasi	0 (2014)	5.600
	b. Jumlah kab/kota yang memiliki minimal satu RSUD yang tersertifikasi akreditasi nasional	10 (2014)	481
	c. Persentase kab/kota yang mencapai 80 persen imunisasi dasar lengkap pada bayi	71,2 (2013)	95
4	Meningkatnya Perlindungan Finansial, Ketersediaan, Penyebaran dan Mutu Obat Serta Sumber Daya Kesehatan		
	a. Persentase kepesertaan SJSN kesehatan (persen)	51,8 (Oktober 2014)	Min 95
	b. Jumlah Puskesmas yang minimal memiliki lima jenis tenaga kesehatan	1.015 (2013)	5.600
	c. Persentase RSUD Kab/Kota kelas C yang memiliki tujuh dokter spesialis	25 (2013)	60
	d. Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas	75,5 (2014)	90,0
	e. Persentase obat yang memenuhi syarat	92 (2014)	94

Kebijakan pembangunan kesehatan difokuskan pada penguatan upaya kesehatan dasar (*Primary Health Care*) yang berkualitas terutama melalui peningkatan jaminan kesehatan, peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang didukung dengan penguatan sistem kesehatan dan peningkatan pembiayaan kesehatan. Kartu Indonesia Sehat menjadi salah satu sarana utama dalam mendorong reformasi sektor kesehatan dalam mencapai pelayanan kesehatan yang optimal, termasuk penguatan upaya promotif dan preventif.

Strategi pembangunan kesehatan 2015 – 2019

1. Akselerasi Pemenuhan Akses Pelayanan Kesehatan Ibu, Anak, Remaja dan Lanjut Usia yang berkualitas
2. Mempercepat Perbaikan Gizi Masyarakat
3. Meningkatkan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan
4. Meningkatkan akses pelayanan kesehatan dasar yang berkualitas
5. Meningkatkan akses pelayanan rujukan yang berkualitas
6. Meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan dan kualitas farmasi dan alat kesehatan
7. Meningkatkan pengawasan obat dan makanan
8. Meningkatkan ketersediaan, penyebaran dan mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan
9. Meningkatkan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

10. Memperkuat Manajemen, Penelitian Pengembangan dan Sistem Informasi
11. Memantapkan Pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Bidang Kesehatan
12. Mengembangkan dan Meningkatkan Efektifitas Pembiayaan Kesehatan

Dari Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat dan Kementerian Kesehatan diatas, terlihat bahwa Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang merupakan aplikasi dan pengembangan dari rencana strategi provinsi dan pusat agar terdapat sinkronisasi kegiatan pengembangan pelayanan kesehatan secara terstruktur dari pusat ke kabupaten/kota. Hal inilah yang menjadi dasar penyusunan rencana strategis Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang.

3.4. TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

Kajian lingkungan dan implikasinya terhadap rencana strategis Dinas Kesehatan Kota Padang terdapat salah satu rencana kegiatan dalam bentuk pencapaian lingkungan sehat di Kota Padang Panjang. Dimana salah satu cakupan/ indikator yang akan di capai adalah ;

- Presentase penduduk yang memiliki akses terhadap air bersih
- Presentase penduduk yang memiliki jamban sehat
- Persentase penyakit menular yang dapat ditangani

Kegiatan diatas dapat terlaksana secara maksimal jika di dukung dengan pengaturan dan pengawasn tata ruang wilayah serta kajian lingkungan hidup strategis yang dilakukan melalui kerjasama lintas sektor dari beberapa SKPD, seperti ; Dinas PU, Dinas Perindagkoptan, Lingkungan Hidup dan lainnya.

3.5. ISU-ISU STRATEGIS

Adapun isu-isu strategis yang menjadi permasalahan dan menjadi target dalam pelaksanaan kegiatan dalam 5 tahun kedepan pada Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang adalah ;

1. Peningkatan Rumah Tangga Sehat (PHBS) diatas 75 %
2. Persentase air minum masyarakat yang memenuhi syarat
3. Persentase penduduk yang memiliki jamban sehat
4. Tingkat keberhasilan pengobatan penyakit TB Paru masih dibawah standar
5. Rendahnya penjangingan kasus penyakit tidak menular (Posbindu PTM)
6. Kuantitas dan kualitas SDM Kesehatan yang kompeten masih kurang
7. Menurunnya kasus gizi kurang/buruk
8. Peningkatan sarana prasarana pelayanan kesehatan dasar Puskesmas
9. Peningkatan Promosi Kesehatan sebagai upaya preventif pencegahan penyakit

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

VISI

Visi merupakan pandangan jauh kedepan, kemana dan bagaimana Dinas Kesehatan harus dibawa dan berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif dan produktif. Maka visi Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang adalah :

”TERWUJUDNYA MASYARAKAT KOTA PADANG PANJANG YANG SEHAT DAN MANDIRI DENGAN PELAYANAN BERKUALITAS ”

Penjelasan Visi :

SEHAT adalah terwujudnya kondisi sejahtera baik fisik, psikologis, mental, spiritual dan perilaku masyarakat dalam mencapai kesehatan secara paripurna dalam menunjang pembangunan Kota Padang Panjang.

MANDIRI adalah sikap dan kondisi masyarakat Kota Padang Panjang yang mampu memenuhi kebutuhan kesehatannya dengan mengandalkan kemampuan dan kekuatan sendiri, memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan pribadi, keluarga, masyarakat dan lingkungannya.

PELAYANAN BERKUALITAS adalah upaya dengan mutu terbaik yang diselenggarakan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, baik melalui pelayanan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif yang merata bagi seluruh masyarakat.

MISI

Misi merupakan sesuatu yang dilaksanakan sesuai dengan visi yang telah ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh aparat dan pihak yang berkepentingan dapat mengenal Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang serta mengetahui peran dan program-program dan hasil yang akan dicapai.

Adapun misi Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang adalah :

1. Mewujudkan pelayanan kesehatan berkualitas dan berdaya saing serta berbasis masyarakat
2. Mewujudkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) kesehatan yang amanah, professional dan tepat guna
3. Mewujudkan sistem informasi dan promosi kesehatan yang berkualitas
4. Meningkatkan Prilaku Hidup bersih dan Sehat (PHBS) pada masyarakat dalam mewujudkan lingkungan yang sehat secara mandiri
5. Meningkatkan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit.
6. Meningkatkan kemitraan lintas sektor, LSM/Lembaga Masyarakat maupun Forum Kota.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Tujuan :

1. Tercapainya Prilaku Hidup bersih dan Sehat (PHBS) pada masyarakat
2. Tercapainya pengawasan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular
3. Tersedianya pelayanan kesehatan yang cepat, bermutu, berdaya saing serta berbasis masyarakat.
4. Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) kesehatan yang amanah, professional dan tepat guna.
5. Meningkatnya kemampuan dan kemandirian individu, keluarga dan masyarakat dalam pemeliharaan kesehatan
6. Tersedianya sarana dan prasarana pelayanan dasar yang representatif dan sesuai standar
7. Mewujudkan pembangunan kesehatan berwawasan lingkungan
8. Tersedianya sistem informasi kesehatan daerah (SIKDA) dan promosi kesehatan yang berkualitas.
9. Meningkatnya kemitraan lintas sektor, LSM/Lembaga Masyarakat maupun Forum Kota.

SASARAN

1. Terwujudnya peningkatan Prilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)
2. Terkendalinya penyakit di tengah masyarakat
3. Terciptanya lingkungan kota yang sehat
4. Peningkatan status gizi masyarakat
5. Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM pelayanan dasar
6. Peningkatan sarana dan prasarana Pelayanan Kesehatan
7. Tersedianya Sistem Informasi Kesehatan Daerah (SIKDA) dan promosi kesehatan yang berkualitas
8. Meningkatnya kemitraan lintas sektor, LSM/Lembaga Masyarakat maupun Forum Kota

4.3. Strategi dan Kebijakan

Arah Kebijakan Pembangunan Bidang Kesehatan di Kota Padang Panjang yaitu Mewujudkan kota Padang Panjang yang amanah, aman dan sejahtera melalui ;

1. Peningkatan PHBS

Dengan strategi :

- 1) Meningkatkan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat.
- 2) Meningkatkan penegakan Perda Kawasan Tanpa Rokok (KTR)
- 3) Meningkatkan peran Posyandu Balita, lansia, dan Posbindu PTM serta Kelurahan Siaga
- 4) Mengoptimalkan Forum Kota Sehat.

2. Meningkatkan status gizi masyarakat

Dengan strategi :

- 1) Meningkatkan pola pikir dan perilaku sadar gizi masyarakat.
- 2) Mengoptimalkan penyuluhan kesehatan kepada masyarakat.

3. Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM pelayanan dasar.

Dengan strategi :

- 1) Meningkatkan kuantitas dan kualitas tenaga kesehatan
- 2) Optimalisasi terhadap akses dan kualitas pelayanan kesehatan
- 3) Meningkatkan tenaga kesehatan yang memiliki sertifikat kompetensi serta penempatan yang sesuai.
- 4) Meningkatnya kemitraan lintas sektor, LSM/Lembaga Masyarakat maupun Forum Kota.

4. Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan

Dengan strategi :

- 1) Peningkatan sarana dan prasarana sesuai standar
- 2) Pembangunan gedung Puskesmas yang representatif
- 3) Percepatan operasional Sistem Informasi Kesehatan Daerah (SIKDA)

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Rencana program dan kegiatan Dinas Kesehatan Kota Padang panjang dalam rangka mewujudkan Visi Dinas Kesehatan, sebagai berikut :

A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan kegiatan :

1. Penyediaan jasa surat menyurat
2. Penyediaan sistem informasi kesehatan
3. Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik
4. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
5. Penyediaan jasa administrasi keuangan
6. Penyediaan jasa kebersihan kantor
7. Penyediaan alat tulis kantor
8. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
9. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan kantor
10. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
11. Penyediaan makanan dan minuman
12. Rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
13. Penyediaan jasa administrasi/teknis perkantoran
14. Penyediaan jasa medis

B. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan kegiatan :

1. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
2. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
3. Pemeliharaan rutin/berkala alat kantor
4. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
5. DAK Bidang Kesehatan
6. Penunjang operasional DAK

C. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

1. Penyediaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
2. Pengadaan pakaian kerja lapangan

D. Program Peningkatan Sumberdaya Aparatur

1. Sosialisasi peraturan perundang-undangan
2. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

E. Program Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
2. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semester
3. Penyusunan laporan prognosis realisasi anggaran
4. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

F. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

1. Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan
2. Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan
3. Peningkatan mutu penggunaan obat dan perbekalan kesehatan.
4. Monev dalam pengawasan obat
5. Pemusnahan obat rusak dan kadaluarsa
6. DAK Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan

G. Program Upaya Kesehatan Masyarakat

1. Pelayanan kesehatan penduduk miskin di Puskesmas dan jaringannya.
2. Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan
3. Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana Puskesmas dan jaringannya.
4. Peningkatan surveillance dan penanggulangan penyakit tidak menular
5. Perbaikan gizi masyarakat
6. Revitalisasi Sistem Kesehatan
7. Pelayanan kefarmasian dan alat kesehatan
8. Pengadaan peralatan dan perbekalan kesehatan termasuk obat generik esensial
9. Peningkatan Kesehatan Masyarakat
10. Peningkatan pelayanan bagi pengungsi korban bencana
11. Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan
12. Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan
13. Penyelenggaraan penyehatan lingkungan
14. Monitoring dan evaluasi
15. Usaha Kesehatan Sekolah
16. BOK

H. Program Pengawasan Obat dan Makanan

1. Peningkatan pemberdayaan masyarakat dibidang obat dan makanan
2. Peningkatan Pengawasan makanan dan bahan berbahaya
3. Peningkatan Penyidikan dan penegakan hukum di bidang obat dan makanan

I. Program Promkes dan Pemberdayaan Masyarakat

1. Penyediaan media promosi dan informasi kesehatan
2. Penyuluhan masyarakat untuk pola hidup sehat
3. Peningkatan pendidikan tenaga penyuluhan kesehatan
4. Pengembangan desa siaga
5. Penetapan kawasan tanpa asap rokok
6. Monev Promkes

J. Program Perbaikan Gizi Masyarakat

1. Pemberdayaan masyarakat untuk keluarga sadar gizi
2. Pemberian makanan tambahan dan vitamin
3. Monev Gizi
4. Penanggulangan gizi kurang, kurang vitamin A dan gangguan yodium

K. Program Pengembangan Lingkungan Sehat

1. Penyuluhan lingkungan sehat
2. Pengembangan tatanan kota sehat
3. Monev Kesling
4. Pengkajian Pengembangan Lingkungan Sehat
5. Sosialisasi Kebijakan Lingkungan Sehat
6. Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)
7. Pembakaran Sampah Medis

L. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

1. Penyemprotan sarang nyamuk / fogging sarang vektor
2. Peningkatan Surveilans epidemiologi dan penanggulangan wabah/KLB
3. Peningkatan KIE Pemberantasan Pencegahan Penyakit
4. Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular
5. Pengadaan alat fogging dan bahan-bahan fogging
6. Pengadaan vaksin penyakit menular
7. Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah
8. Pencegahan penularan penyakit endemik dan epidemik
9. Monev

M. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

1. Penyusunan Standar Pelayanan Kesehatan
2. Akreditasi Puskesmas
3. BLUD

N. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Puskesmas dan Jaringannya

1. Pemeliharaan rutin/berkala gedung puskesmas dan jaringannya
2. Pemeliharaan rutin berkala sarana/prasarana puskesmas dan jaringannya
3. Pengadaan sarana prasarana puskesmas dan jaringannya
4. Rehab sedang/berat gedung puskesmas dan jaringannya
5. Pembangunan Puskesmas dan jaringannya

O. Program Peningkatan Kesehatan Anak Balita

1. Imunisasi bagi anak balita
2. Pendidikan dan pelatihan perawatan anak balita
3. Monev Kesga

P. Program Peningkatan Kesehatan Lansia

Pelayanan dan pemeliharaan kesehatan perawatan lansia

Q. Program Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak

1. Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dan keluarga kurang mampu
2. Perawatan berkala bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu
3. Pelaksanaan kelas ibu dan balita

(Tabel Indikator, sasaran dan pagu dana indikatif terlampir)

BAB VI
INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN
RPJMD

SASARAN RPJM dan INDIKATOR KINERJA :

1. Peningkatan PHBS
 - a. Meningkatnya persentase penduduk yang menggunakan jamban sehat
 - b. Meningkatnya persentase penduduk yang memiliki akses air bersih
 - c. Meningkatnya persentase penduduk yang tidak merokok di rumah
 - d. Meningkatnya angka keberhasilan pengobatan pasien TB paru semua kasus
 - e. Meningkatnya persentase penjarangan penyakit tidak menular
 - f. Penyempurnaan capaian 8 Tatanan Kota Sehat
 - g. Meningkatnya sarana prasarana CPTS di sekolah
2. Meningkatkan status gizi masyarakat
 - a. Menurunnya persentase status gizi kurang balita
3. Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM Pelayanan Dasar
 - a. Meningkatnya persentase tenaga kesehatan yang memiliki sertifikat kompetensi yang sesuai dengan penempatan.
4. Peningkatan sarana prasarana pelayanan kesehatan
 - a. Terwujudnya Puskesmas yang terakreditasi
 - b. Meningkatnya operasional Sistem Informasi Kesehatan Daerah (SIKDA)
 - c. Pembangunan gedung Puskesmas yang representatif
5. Meningkatnya Nilai SAKIP Dinas Kesehatan Kota
Nilai SAKIP

(Tabel lengkap terlampir)

BAB VII PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang yang mengacu kepada RPJMD Kota Padang Panjang disusun untuk menjadi acuan dalam perencanaan dalam pelaksanaan program dan kegiatan selama lima (5) tahun.

Pelaksanaan Renstra ini bertujuan untuk mewujudkan efektifitas kegiatan SOPD yang dilaksanakan berdasarkan tujuan, sasaran dan target yang telah di tetapkan. Rencana Strategis ini juga digunakan untuk melakukan monitoring/penilaian terhadap program dan kegiatan pada Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang

Padang Panjang, Maret 2017

Plt.KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA
PADANG PANJANG

dr.RIO AKHDANELLY,M.Kes
NIP: 19650319 200003 2 002

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

**DINAS KESEHATAN KOTA PADANG PANJANG
TAHUN 2013 - 2018**



**DINAS KESEHATAN
KOTA PADANG PANJANG
TAHUN 2014**

